



PENGANTAR REDAKSI

Indonesia sebagai bangsa yang besar menghadapi tantangan besar pula dalam mendidik bangsa. Upaya mendidik bangsa dari masa ke masa mengalami pasang surut, meluasnya konflik sosial, meningkatnya korupsi, dan kemiskinan dianggap menjadi musuh besar bangsa ini. Beragam cara telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk mendidik bangsa. Namun, permasalahan di atas tak kunjung mendapatkan solusinya. Merespon kondisi tersebut, masih terbersit keinginan untuk menciptakan Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan sejahtera. Meskipun upaya yang diciptakan masih mempertarungkan konsep rekayasa (*by design*) versus alamiah (*by nature*) secara bersamaan, sehingga dampak sosial, budaya dan politik yang diakibatkan kontestasi kedua konsep tersebut belum dapat teratasi.

Jurnal Pemikiran Sosiologi (JPS) volume 2 No.1 Mei 2013, merupakan edisi ketiga yang diharapkan dapat mengayakan wacana mendidik bangsa, berbagai perspektif dilontarkan oleh penulis untuk memahami dan mengajak pembaca melihat kondisi nyata perjalanan kehidupan bangsa ini. Dalam penyajiannya para penulis mengangkat konsep dan menjelaskan praktik mendidik bangsa Indonesia dalam berbagai ranah. Pertama, Tadjudin Noer Effendi menyatakan bahwa, gotong-royong mengandung beberapa unsur modal sosial yang mempengaruhi kondisi masyarakat kontemporer berada dalam situasi kekacauan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya penerapan nilai-nilai gotong royong dalam interaksi sosial. Begitu pula perubahan sosial yang cepat serta kuatnya tekanan dari luar, terutama ideologi liberal yang berdasarkan individualisme menjadi penyebab kekacauan sosial tersebut. Kedua, Ariefa Efaningrum menyatakan dalam tulisannya bahwa, sejumlah pemikiran dan konsep yang meyakini pentingnya faktor kultural dalam mendorong dinamika perubahan institusional, khususnya dalam konteks persekolahan (*schooling*). Perlu tilikan secara seksama bahwa budaya/kultur merupakan kekuatan konstitutif untuk inovasi dan perubahan sosial, sekaligus memiliki kekuatan reflektif dalam melakukan peran legitimasi sosial. Ketiga, Wahyu Budi Nugroho menyatakan



kemunculan trayektori pendidikan ditengarai oleh perceraian antara teori dengan praksis yang kemudian memunculkan klasifikasi ilmu ke dalam dikotomi *low science* dan *high science*. Persoalan menjadi kian pelik manakala dihadapkan pada tatanan kapitalisme-lanjut yang begitu mensakralkan ukuran-ukuran ekonomi sehingga beberapa ilmu pengetahuan (disiplin) dirasa tak lagi relevan keberadaannya. Keempat, Barito Mulyo Ratmono menyatakan belum membaiknya kultur Polri hingga saat ini dikarenakan adanya proses produksi yang cacat di pabrik aktor Polri, dampaknya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan melalui proses hegemoni serta pertarungan kepentingan antar aktor Polri. Merespon hal tersebut perlu perubahan kultur Polri yang dimulai dari lembaga pendidikan dan satuan kewilayahan secara bersamaan melalui proses hegemoni untuk menanamkan gagasan dan tindakan yang sesuai dengan nilai, norma, dan simbolisasi normatif kultur Polri sesungguhnya. Kelima, Dedi Ilham Perdana menganggap perubahan kurikulum dan pendidikan yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa serta pengaruhnya pada masyarakat menjadi titik tolak berbagai isu terkait kurikulum baru 2013 serta dampaknya bagi dunia pendidikan saat ini. Keenam, Ahmad Fadli Azami menyatakan pesantren telah berhasil menunjukkan model pendidikannya yang cukup kokoh dalam menghadapi berbagai guncangan. Tak heran jika model pendidikan itu masih tetap diakui oleh masyarakat islam pada umumnya. Dalam konteks kekinian di mana dunia pendidikan lebih menonjolkan kecerdasan intelektual, pesantren hadir dengan warna yang berbeda. Ketujuh, Umi Latiefah menyatakan terdapat konstruksi identitas ketika waria memandang dirinya melalui masyarakat dan sebaliknya masyarakat memandang identitas waria. Pada realitanya waria masih mendapatkan perlakuan diskriminatif karena identitasnya dipandang sebagai suatu penyimpangan. Kedelapan, Dewi Cahyani Puspitasari menyatakan dalam prakteknya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) mengalami transformasi sejak pengelolaan zakat tahun 1990-an. Kondisi ini berupa pola distribusi zakat beralih dari ranah amal sosial keagamaan menuju ranah pemberdayaan pengembangan ekonomi.

Redaksi.